Phinisi Integration Review
Vol. 4, No.3, Oktober 2021 Hal 354-363
Website: http://ojs.unm.ac.id/pir
p-ISSN: 2614-2325 dan e-ISSN: 2614-2317
DOI: https://doi.org/10.26858/pir.v4i3.24392

Dinamika Kabupaten Dompu Pada Masa Pemerintahan Abubakar Ahmad Tahun (2000-2005)

Abdul Azis[1] Najamuddin[2] Ahmadin[3]
[123]Sejarah, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
[1]Email: Abdulazis.bagas20@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Gambaran Umum Kabupaten Dompu (ii) Proses pemilihan Bupati Dompu Tahun 2000-2005 (iii) Perkembangan Kabupaten Dompu Masa Pemerintahan Abubakar Tahun 2000-2005 (iv) Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Dompu Tahun 2000-2005 (v). Hasil Penelitian menunjukan bahwa: DPRD Kabupaten Dompu menetapkan pemilihan Kepala Daerah dengan mengacu keputusan Mendagri No. 36 Tahun 1995 pada pasal 8 dan pasal 14 ayat 1. Terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan pusat, diharapkan agar dapat terfokus dalam penyelenggaraan pemerintah daerahpun mengalami perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan mengeluarkan penetapan presiden (panpres No 6 tahun 1959) tentang pemerintah daerah disempumakan dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang urusan rumah tangga daerah (Otonomi) dan tugas. Perbantuan dalam pemerintahan tetap dilakukan berdasarkan ketentuantuan daerah dalam Undang-undang No l tahun 1957. Struktur pemerintahan tersebut berlaku secara seragam di yang baru terbentuk integral termasuk Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu telah membangun delapan (8) puskesmas dan sembilan (9) puskesmas keliling. Puskesmas yang di maksud ialah Puskesmas Kecamatan Dompu,Puskesmas Dompu Timur, Puskesmas Pajo,Puskesmas Hu,u, Puskesmas Woja, Puskesmas Kempo, Puskesmas Manggelewa, Puskesmas Kilo, dan Puskesmas Pekat, dan masing-masing menpunyai mobil Puskesmas keliling untuk meringankan pekerjaan Puskesmas tiap-tiap kecamatan. Dan rumah sakit umum ada satu dan puskesmas pembantu ada 12 serta jumlah puskesmas keliling Pada tahun 2001-2005. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dompu sangat meningkat, disebabkan oleh beberapa penghasilan yang mendukung kemajuan tersebut sehingga Kabupaten Dompu Pertumbuhan nilai tambah tersebut disebabkan oleh peningkatan volume barang/jasa.Pembangunan. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah membangun dan memperbaiki beberapa sarana pendidikan.: Taman Kanak-Kanak sebanyak 64 sekolah, jumlah sekolah dasar di kabupaten Dompu yaitu 203 sedangkan pendidikan menengah dilingkungan Depdiknas kabupaten Dompu jumlah SLTP tercatat sebanyak 28 sekolah, dan SMA 16 SMK 4.

Kata Kunci : Dinamika,Kabupaten Dompu,Pemerintahan,Abubakar Ahmad Tahun (2000-2005)

Abstract. This study aims to determine: (i) General description of Dompu Regency (ii) Dompu Regent election process in 2000-2005 (iii) Development of Dompu Regency during the Abubakar Administration in 2000-2005 (iv) Socio-Economic Development of Dompu Regency in 2000-2005 (v). The results of the study show that: The Dompu Regency DPRD determines the election of the Regional Head by referring to the Minister of Home Affairs Decree No. 36 of 1995 on article 8 and article 14 paragraph 1. Changes occur in the central state administration system, it is hoped that the focus in the administration of regional government will experience changes. This change was made by issuing a presidential decree (Panpres No. 6 of 1959) concerning regional government,

thus improving the implementation of regional government in the field of regional household affairs (autonomy) and duties. Assistance in government continues to be carried out based on the provisions of regional lords in Law No. 1 of 1957. The government structure applies uniformly to newly formed integrals including Dompu. The Dompu Regency Government has built eight (8) health centers and nine (9) mobile health centers. The health centers in question are the Dompu District Health Center, East Dompu Health Center, Pajo Health Center, Hu,u Health Center, Woja Health Center, Kempo Health Center, Manggelewa Health Center, Kilo Health Center, and Pekat Health Center, and each has a mobile health center car to ease the work of the Puskesmas every day. - each district. And there is one general hospital and 12 sub-health centers and the number of mobile health centers in 2001-2005. The economic growth rate of Dompu Regency is increasing greatly, due to several incomes that support the progress so that Dompu Regency's added value growth is caused by an increase in the volume of goods/services. Development. The Department of Education and Culture has built and repaired several educational facilities: Kindergartens as many as 64 schools, the number of elementary schools in Dompu district is 203 while secondary education within the Ministry of National Education of Dompu district has 28 schools, and 16 high schools and 4 vocational schools.

Keywords: Dynamics, Dompu Regency, Government, Abubakar Ahmad (2000- 2005)

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemerdekaan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dan longan masyarakat merupakan kelanjutan dari Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia melibatkan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Revolusi sebagai proses politik timbul dalam suatu kritis pada golongan-golongan masyarakat terlibat dalam konflik untuk mengusahakan perubahan politik dengan cara-cara radikal. Meskipun revolusi Indonesia merupakan revolusi politik untuk menghapuskan penjajahan, dinamika perubahan yang menyertainya meliputi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Revolusi mengandung pengertian sebagai perubahan masyarakat berjalan relatif cepat. Perubahan itu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibanding dengan masa sebelumnya. Pembicaraan mengenai revolusi mengingatkan kita pada masyarakat yang penuh pergolakan kekerasan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada periode tahun 1945-1949 membuktikan hal itu, untuk merebutkan kekuasaan, penghianatan, pemerasan, perampokan, dan berbagai tindak kekejaman lainya sangat mewarnai revolusi. (Sartono Kartodirjo, 1982:80)

Sejarah Dompu yang bermula kerajaan Dompo yang berlansung sejak berabad abad lamanya dimulai dari Dewa Bantara pada abad ke-9 samapai dewa ma Wa'a mataho pada abad ke-7 masehi. Kabupaten Dompu, sebelumnya merupakan Daerah Swapraja Tingkat II dari bagian Provinsi sunda kecil. Daerah Swatantra Tingkat II Dompu. Kemudian, secara resmi mendapat status sebagai Daerah Swapraja sejak tanggal 12 September 1947 dan selanjutnya diangkat Sultan Dompu terakhir yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin sebagai kepala Daerah Swaparaja Dompu. Tahun 1958 Daerah Swapraja Dompu berubah status menjadi Daerah swatantra tingkat II Dompu dengan Kepala Daerah Sultan Dompu Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin (1958–1960). Status Kabupaten Dompu sejak tahun 1958 yaitu sejak di undangkan UU No. 69 tahun 1958 sbelum itu Dompu daerah swantara tingkat II dengan ketetapan Mendagri melalui surat keputusan 29 Oktober 1958No.7/14/34. (Manggaukangraba, 2002: 15).

Kabupaten Dompu diapit oleh dua Kabupaten yang besar batas yaitu Sebelah barat berbatasan Kabupaten Sumbawa,dan sebelah utara berbatasan dengan laut Flores dan Kab. Bima, sebelah timur bersebelahan dengan Kabupaten Bima dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra Indonesia. Ditinjau wilayah administrasinya maka Kab. Dompu terbagi Delapan Kecamatan itu antara lain; Kec. Dompu, Kec. Woja, Kec. Manggelewa, Kec. Kempo, Kec. Kilo, Kec. Pekat, dan Kec. Pajo dan Kec. Hu,u.

Pada proses pemilihan Bupati Dompu yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Dompu banyak menuai controversial dalam hal ini Forum Pemuda Peduli Dompu (FPPD) dan Ikatan Mahasiswa Dompu (IMD) serta lembaga LSM lainya menolak hasil keputusan dari pihak DPRD yang tidak sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku. Pennyelenggara otonomi daerah di baawah UU No 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD, terutama memberikan kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan melalui mekanisme yang di tentukan, kewenangan yang luas itu sebernarnya dapat di manfaatkan dengan baik dan secara optimal sebab hal tersebut merupakan tolak ukur kinerja DPRD secara politis. Pada masa pemerintahan Abubkar Ahmad Visi dan Misi yang dijalankan, Visi Terwujudnya masayrakat Dompu yang sejahtera religius dan di semangati SEMBOYAN NGGAHI RAWI PAHU, Misi terwujudnya Ekonomi, Sosial, Politik dan Keagamaan

KAJIAN PUSTAKA

Dinamika Sosial

Dinamika sosial berarti manusia selalu berkembang mengalami perubahan akan selalu ada dalam setiap kelompok sosial. Ada yang mengalami mengalami perubahan secaracepat (Soerjono Soekanto, 2006: 146) Dinamika kelompok sosial juga bisa diartikan, bahwa suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dengan antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama (Slamet Santosa, 2006: 5)

Dinamika Politik

Dinamika politik sangat terkait sekali partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menuikan keinginan pemerintah maka medium yang disediakan hanyalah medium birokrasi dan perencanaan,penjaringan aspirasi dan sejenisnya.

Menurut Slamet Santosa (2004) mengemukakan Dinamika adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik dengan interaksi dan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

A. Pengertian Kabupaten

Secara posisi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tahun1945(http://abdiprojo.blogspot. cm/2010/04/pengertian-tentang-pemerintah-daerah.html).

Dinamika Kabupaten

Kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah propinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati, selain Kabupaten, pembagian wilayah administrasi setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi, karena itu Bupati atau Wali Kota tidak bertanggung jawab kepada Gubernur, Kabupaten maupun merupakan daerah otonomi yang diberi wewenang mengatur dmengurus urusan pemerintahan sendiri, (Wikipedia, 2012: 35).

Pemerintahan Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu sebelumnya Daerah swapraja tingkat II dari bagian provinsi sunda kecil. indonesia dan mengalami beberapa kali proses perubahan pasca diproklamasikannya kemerdekaan republik indonesia, barulah terbentuk daerah swatantra tingkat II Dompu. Kemudian, secara resmi mendapat status sebagai daerah swapraja sejak tanggal 12 september 1947 dan diangkat sultan Dompu terakhir yaitu sultan Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin sebagai kepala daerah swaparaja Dompu. Tahun 1958 daerah swapraja Dompu berubah status menjadi daerah swatantra tingkat II Dompu dengan Bupati kepala daerah sultan Dompu Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin (1958 – 1960).

METODE

Penulisan sejarah adalah rekontruksi yang imajinatif dari masa lampau untuk umat manausia berdasarkan data yang di peroleh dengan menempuh proses intelektual, kritis dan kontruktif berdasarkan metode sejarah. Peristiwa masa lampau itu hanyalah satu kali untuk mengingat kelampauan Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan metodologi sejarah penyusunan (sjamsuddin, 2012:14).

Pendekatan Metode sejarah merupakan penyusunan konsep-konsep dalam membuat ekpalanasi umum lebih rinci mengenai peristiwa serta proses tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sebab peristiwa sebenarnaya. Dalam metodologi ini membahas mengenai kerangka-kerangka pemikiran tentang konsep, kategori, model, hipotesis dan prosesdur umum digunakan penyusunan teori.

Penelitian merupakan kajian peristiwa sejarah, mengenai Dinamika Pemerintahan Abubakar Ahmad Tahun (2000-2005) penentuan lokasi penelitina ini berpusat di Kabupaten Dompu yang berkaitan dengan tinjauan sosial Politik pada masa pemerintahan Abubakar Ahmad.

Sumber data utama dalam ilmu sejarah adalah pada hakekatnya dibagi atas dua, yakni sumber data primer dan sumber data skuder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah arsip. Dalam sumber primer berupa arsip biasanya disalin sehingga keabsahanya perlu diragukan dan dicocokan dengan aslinya.Arsiap mengalami perubahan tidak dapat dijadikan sumber primer dalam penelitian ini, akan tetapi masuk pada kategori sumber data skunder. Sedangkan sumber berupa dokumen dan arsip, pada umumnya jarang mengalami perubahan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari sumber dokumen tinggi tingkat kevalidanya.

Instrumen penelitian merupakan alat megumpulkan data, kualitas intrumen akan menentukan kualitas data. (Zuriah, 2009:168) Sebagai mana yang dipahami bahwa instrumen penelitian kualitatif adalah manusia (*human as instrument*). Oleh karena itu instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Megumpulkan berbagai informasi atau hal-hal yang berkiatan dengan masalah yang akan diteliti dengan melibatkan diri secara langsung dan dalam objek penelitian instrumen yang di gunakan ialah wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Menurut Nurul zuriah (2009: 168)

Penelitian kualitatif berupaya megungkap beberapa kondisi perilaku masyarakat yang telah diteliti dan situasi lingkugan di sekitarnya. Hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diatara pegalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, serta hasil pegamatan visual dan valid, yang menjelakan momen nilai-nilai rutinitas dan problematika kehidupan setiap individu yang terlibat didalam penelitian. (Gunawan, 20015). Dengan melihat beberapa data yang digunakan dalam penelitan kualitatif maka menggunakan metode seperti kajian pustaka, observasi, atau pegamatan, wawancara dengan kriteria peyususan pertayaan, serta dokumentasi.

Analisis data bertujuan untuk menguji dan menilai tingkat keabsahan suatu data. Langkah ini dalam metodologi sejarah merupakan rangkaian dari kritik sumber, interpretasi dan histografi.

Pada tahap ini, data dan sumber yang dipeoleh kemudian diseleksi dan diuji kebenaranya dan keabsahanaya. Menurut Notosusanto, (1971:20)

Interpretasi

Interpretasi adalah sebuah tahapan dari metode sejarah berupa kegiatan untuk menafsirkan terhadap fakta sejarah yang sudah di seleksi melalui kritik eksteren atau interen.

Histografi

Histografi merupakan tahap ahir dari sebuah rangkaian penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis berusaha untuk memahami realitas sejarah yang terjadi tentang "Dinamika Kabupaten Dompu Pada Masa Pemerintahan Abubakar Ahmad Pada Tahun (2000-2005)"

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Dompu

1. Keadaan Geografis Kabupaten Dompu

Untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Kabupaten digambarkan letak dan keadaan geografis Kabupaten. Secara geografis,Kabupaten Dompu terletak 117º 42' – 118º 30º Bujur Timur dan 8º 06' – 9º 05' batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara	: Laut Flores
Sebelah Selat	: Lautan Indonesia
Sebelah Timur	: Kabuaten Bima
Sebelah Barat	: Sumbawa

2. Keadaan Penudduk

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, yang ada di Kabupaten dapat dijelaskan dari uraiayan sehingga dapat diketahui bagaimana Jumlah Penduduk, Luas Penduduk Per Km^2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Dompu.

3. Keadaan Ekonomi

Topografi Kabupaten Dompu, terdapat 56,784 ha (23,43 %) tanah dengan ketingian antara 0-100 meter di atas permukaan laut, 123,020 ha (52,92%) berada pada ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan laut, dan 38,558 ha (16,59%) berada pada ketinggian 500-100 meter di atas permukaan laut, serta terdapat 14,098 ha (6,06%) tanah berada pada ketinggian di atas 100 meter dari permukaan laut. Bila dilihat dari tingkat kemiringan terdapat 43.470 ha berada pada kemiringan antara 0-2 %, 81.795 ha berada pada kemiringan antar 2-25 % yang merupakan areal yang paling luas, 75.785 ha berada pada kemiringan 15-40 % dan terdapat 31.410 ha berada pada kemiringan di atas 50 %. Bila dilihat dari kedalaman efektif, tanah di Kabupaten Dompu berada pada kedalaman kurang dari 30 cm seluas 13.258 ha berada di Wilayah Kecamatan Woja, berada pada kedalaman antara 30-60 cm seluas 63.648 ha tersebar di Kecamatan Dompu, Hu'u dan Pekat, berada pada kedalaman 60-90 cm seluas 140.156 ha tersebar di Bagian Barat Kecamatan Pekat, Timur Kecamatan Kilo, Woja dan Selatan Kecamatan Hu'u, dan terdapat 15.408 ha tanah yang terletak di bagian Barat Kecamatan Pekat, Woja, Dompu, dan Hu'u berada pada kedalaman di atas 90 cm (Profil Kabupaten Dompu).

4. Keadaan Sosial Budaya

Bidang Sosial Masyarakat Kabupaten Dompu mempunyai kehidupan sosial yang berbeda dengan masyarakat Kabupaten lain. Dalam hal ini ditandai dengan adanya status sosial yang berbeda Masyarakat Kabupaten Dompu memiliki variasi, serta perbedaan-perbedaan diantara kelompok masyarakat dari

berbagai jenis kegiatan sosial yang di lakukan dan dapat menciptakan hubungan harmonis dan martabat. Dari hasil pengamatan tentang

"……Pendapat di atas diperkuat oleh Ahli Sosiologi, W.H. Jhon. Untuk mencapai suatu kehidupan sosial harus melalui proses sosial sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai timbal dalam kehidupan bersama dalam masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu. Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial. sosial" (Tim Sosiologi, 1995: 60 dalam Darsono, 2005 : 60).

5. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Dompu Tahun 2000-2005

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu dengan pendidikan dapat mengembangkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dim iliki oleh peserta didik. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia, baik ditempuh dengan pendidikan formal maupun non formal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suwamo sebagai berikut:

Manusia itu adalah animal educable artinya manusia itu pada hakekatnya adalah manusia dapat didik. Disamping itu manusia adalah animal educandum artinya manusia itu pada hakekatnya mahluk yang harus dididik dan hume educandus artinya manusia adalah mahluk yang bukan saja harus dan dapat di didik tetapi juga harus dan dapat mendidik.

Berkaitan dengan pembagian suatu daerah, maka pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan tenaga-tenaga terdidik, trampil dan bertanggungjawab dalam proses pembangunan bangsa secara keseluruhan. Namun demikian hal ini akan mengalami ketimpangan bila tidak didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti gedung, tenaga pengajar dan perlengkapan pendidikan lainnya.

Oleh karena itu dalam mensukseskan pembangunan kabupaten Dompu dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan telah membangun dan memperbaiki beberapa sarana pendidikan. Sarana tersebut terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah Pertama/sederajat, dan Sekolah Menengah Umum/Sederajat Perkembangan sarana pendidikan antara tahun 1958-1984 antara lain: Taman Kanak-Kanak sebanyak 64 sekolah, jumlah sekolah dasar di kabupaten tingkat II Dompu yaitu 203 sedangkan pendidikan menengah dilingkungan Depdiknas kabupaten Dompu jumlah SLTP tercatat sebanyak 28 sekolah, dan SMA 16 dan SMK 4 (Hasil Wawancara dengan Ibu Safitri pada Jum'at 02 April 2021).

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Dinamika KabupatenDompu Tahun 2000-2005

Kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah propinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati, selain Kabupaten, pembagian wilayah administrasi setelah provinsi adalah kota. Secara umum, kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu Bupati atau Wali Kota tidak bertanggung jawab kepada Gubernur, yang merupakan daerah otonomi diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, (Wikipedia, 2012: 35).

Daerah memperhatikan syarat dan jumlah penduduk, luas daerah, perlahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Pembentukan, nama, batas, Ibu kota, hak, dan wewenang, urusan dan modal pangkal Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 ditetepkan Undang-undang. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibu kotanya ditetapkan Peraturan Pemerintah (Sumber: Arsip Kabupaten Dompu, 2013).

2. Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Dompu Tahun 2000-2005 .

Perubahan sosial dalam kelompok masyarakat merupakan perubahan pada aktifitas dan perlakuan hidup manusia termasuk sarana dan prasarana Perkembangan sosial dilihat dengan tumbuhnya sekolah sekolah dan lembaga sosial setelah terbentuknya Dompu. Kesehatan pemerintah kabupaten Dompu, menyediakan fasilitas kesehatan. Sebelum tahun 1958 di Dompu, hanya tersedia satu rumah sakit umum. Pemerintah telah membangun delapan (8) puskesmas dan sembilan (9) puskesmas keliling, Selain itu pemerintah juga menggalang pos pelayanan terpadu bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kegiatan penerangan dalam bidang kesehatan.

Puskesmas yang di maksud ialah Puskesmas Dompu, Dompu Timur, Puskesmas Pajo, Hu,u, Woja, Kempo, Manggelewa, Kilo, dan Pekat, dan masing masing menpunyai mobil Puskesmas keliling dalam untuk meringankan pekerjaan Puskesmas tiap-tiap kecamatan. Dan rumah sakit umu ada satu dan puskesmas pembantu ada 12 serta puskesmas keliling 44 (Hasil Wawancara Pada hari Rabu 07 Febuari 2021).

3. Dinamika Politik di Kabupaten Dompu Tahun 2000-2005

Pada umumnya dapat di katakana bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan politik.

Sebagaimana dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Dompu pada saat ini bahwa kehidupan politik yang dilakukan oleh Bupati Dompu terhadap masyarakat Kabupaten Dompu dapat di rasakan perubahannya dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Bupati Dompu menunjukkan dirinya dihadapan masyarakat untuk tetap eksis dalam upaya meningkatkan kinerjanya dengan segala prioritas dengan tujuan-tujuan membentuk kelompok dengan kemampuan dan profesi rakyatnya guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Bupati Dompu saat ini, sangat berbeda dibanding sebelumnya dimana pada saat ini sangat dekat dengan masyarakat hal ini di tandai dengan berbagai macam-macam rencana yang perjuangkan oleh masyarakatnya. peningkatan sumber daya manusia dibidang ekonomi, tidak lepas dari kehidupan politik yang dijalani saat ini, salah satu partai yang menjadi berusaha dalam simpatisan masyarakat melalui program kerja Bupati Dompu yang sedang di upayakan sekarang peningkatan ekonomi masyarakat yang bersumber dari bantuan pemerintah (Hasil Wawancara Pada Kamis 08 April 2021).

4. Pemerintahan Kabupaten Dompu Tahun 2000-2005

a. Sistem Pemerintahan Kabupaten Dompu Sebelum Tahun 2000-2005

Pada sistem ini tidak mengenal model demokrasi perwakilan karena lembaga untuk membuat kebijakan desa lebih bersifat elitis terdiri atas para tokoh masyarakat yang menjadi elemen dari lembaga ketahanan masyarakat (LKMD), yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintahan Kabupaten, tokoh masyarakan dan pemuda. Prinsip kekuasaan antara pemerintah Kabupaten mennjadi lebih jelas dan Sistem pemerintahan Kabupaten merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh instansi desa untuk dapat mewujudkan suatu perubahan atau kegiatan yang dilakukan di dalam Kabupaten itu sendiri, sehingga persoalan yang ada di dalam

desa tersebut dapat dilakukan secara forontal (Hasil wawancara Pada Senin, 05 April 2021).

5. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Dompu Tahun 2000-2005

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sang penting dalam kehidupan manusia. Manusia itu adalah animal educable artinya manusia itu pada hakekatnya adalah manusia dapat didik. Disamping itu manusia adalah animal educandum artinya manusia itu pada hakekatnya mahluk yang harus dididik dan hume educandus artinya manusia adalah mahluk yang bukan saja harus dan dapat di didik tetapi juga harus dan dapat mendidik. Berkaitan dengan pembagian suatu daerah, maka pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan tenaga-terdidik, trampil dan bertanggung jawab dalam proses pembangunan bangsa secara keseluruhan. Namun demikian hal ini akan mengalami ketimpangan bila tidak didukung dengan adanaya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, tenaga pengajar dan perlengkapan pendidikan lainnya.

Oleh karena itu dalam mensukseskan Pemerintahan Kabupaten Dompu dalam hal ini dinas pendidikan telah membangun memperbaik sarana pendidikan terdiri atas Taman Kanak-Kanak, SDN, SMPN, SMA, dan SMK perkembangan sarana pendidikan antara tahun 1958-1984 antara lain: Taman Kanak-Kanak sebanyak 34 sekolah, jumlah sekolah dasar di Kabupaten Dompu yaitu 139 pendidikan Depdiknas kabupaten Dompu jumlah SLTP tercatat sebanyak 14 sekolah, dan SMTA terdiri atas 7 buah sekolah (Hasil Wawancara dengan Ibu Safitri pada Jum'at 02 April 2021).

6. Proses pemilihan Bupati Dompu tanun 2000-2005

Sementara proses pemilihan Bupati dinilai oleh sebagian kalangan masih di warnai gejolak, dengan hal ini muncul berbagai isu dalam proses pemilihan Bupati, isu yang paling sentral ialah isu Money Politik yang mengenai proses pemilihanya. Proses dan protes dari berbagai kalangan masyarakat baik tokoh masyarakat pemuda bahwa kepala daerah yang di pilih oleh DPRD Kabupaten Dompu pada tahun 2000 tidak dapat di pertanggung jawabkan secara politik sebab sebelumnya masyarakat Dompu tidak pernah mengenal kepala daerah yang di pilih tersebut sehingga legitimasinya dimata rakyat ke bawah di ragukan. pemilihan Bupati Kabupaten Dompu di anggap gagal dan ini salah satu kegagalan DPRD Kabupaten Dompu dalam mengembangakan amanat rakyat yang lebih menghendaki pemimpin yang sudah kenal baik dan sudah tau persis masalah-masalah yang berkembang di masyarakat Dompu sehingga tidak perlu lagi khawatir karena masayrakat Ngagahi Rawi Pahu dikenal ramah. Nursalam dari fraksi TNI/Polri mengatakan dalam hal proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dompu Relatif Berjalan Aman dan terkendali setelah melalui Tiga proses yakni proses pertama penjaringan bakal calon, kedua proses penjaringan calon, ketiga proses pemilihan.

Tahap pertama melalui menyaring semua usulan dari semua masyarakat yang diwakili oleh ORMAS dan OKP Akademis dan tokoh masyarakat dan aspirasi akan kaji oleh DPRD sehingga menghasilkan 16 orang nama. Tahap Kedua dari 16 orang tersebut dilakukan yang terseleksi menjadi 9 orang yang selanjunya di uji oleh semua fraksi sehingga menghasilkan 6 orang yang ditetapkan menjadi calon tetap.

1. Drs. Noor Azis
2. H. Abubakar Ahmad
3. H. Ahmad MK
4. Ir H. Umar
5. Drs. Abdul Kahir
6. H. Sahrul Abubakar

Tahap Ketiga adalah pemilihan dengan mengacu ketentuan pasal 8 keputusan Mendagri No. 36 tahun 1995 dan pasal 14 ayat 1 keputusan DPRD Kabupaten Dompu No. 09/KPTS/DPRD/2000 tentang tata tertib pemilihan calon kepala Daerah Kabupaten Dompu. Dan proses pemilihan dilakukan dengan Dua tahap dan tahap pertama untuk menghasilakan 3 nama proses perolehan suara masing-masing calon pemilihan terebut:

1. Drs. Noor Azis = 7
2. H. Abubakar Ahmad = 14
3. H. Ahmad MK = 1
4. Ir H. Umar = 1
5. Drs. Abdul Kahir = 1
6. H. Sahrul Abubaka = 1
7. **Jumlah** = 25

Sesuai dengan pemilihan tersebut pada tahap Kedua tidak dilanjutkan karenya 50%+1 sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib pemilihan tersebut, sehingga di tetapkan Kepala Daerah Kabupaten Dompu melalui suara terbanyak yaitu: Abubakar Ahmad sebagai Bupati dan Noor azis sebagai wakil Bupati Dompu.

Tanggal 9 Agustus 2005, H. Abubakar Ahmad, SH kembali memimpin Kabupaten Dompu untuk periode ke- dua berpasangan dengan H. Syaifurrahman Salman, SE. H.

Abubakar Ahmad, SH, merupakan pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada Bab-Bab sebelunya maka dapat di tarik kesimpulan. Terkait proses pemilihan Buapati Kabupaten Dompu Sesuai dengan pemilihan tersebut pada tahap Kedua tidak dilanjutkan karenya sayratnya 50%+1 sebagaimana tertuang dalam tata tertib tersebut, sehingga di tetapkan Kepala Daerah Kabupaten Dompu melalui suara terbanyak yaitu: Abubakar Ahmad sebagai Bupati dan Noor azis sebagai wakil Bupati Dompu.

Terbentuknya Kabupaten Dompu tidak terlepas dari latar belakang historisnya, yakni sejak terbentuknya kerajaan Dompu dengan sistem pemerintahan tradisionalnya, kemudian disempurnakan ketika Dompu telah berkembang sebagai sebuah kesultanan (Kerajaan Islam). Akan tetapi hanya kekuasaan Belanda membawa perubahan sistem pemerintahan dan memasukan hukum serta atura Belanda kedalam sistem kesultanan. Belandadapat menguasai Dompu baik secara politik maupun ekonomi di bawah penguasaan Afdeling Bima. Demikian pula pada masa kedudukan Jepang. Kemudian berdasarkan Undang-umdang No. 69 tahun 1958 Swapraja Dompu menjadi daerah swatantra tingkat II Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan di bentuknya kebupaten Dompu, maka Dompu mulai menata diri untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Dompu pada khususnya.

Dan selanjunya terbentuknya kabupaten Dompu, berdasarkan Undang-undang No. 69 tahun 1958, maka pembangunan dilaksanakan sampai dengan akhir Repelita III bahkan mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pemukiman penduduk, pengadaan pasar, serta pelayanan sosial yang semakin meningkat seperti pengadaan fasilitas politik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sarana maupun sarana kegiatan perekonomian. Peningkatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah Dompu dan dukungan masyarakat dalam rangka mengembangkan pemerintahan Kabuapaten Dompu.

Dalam rangka mengembangan kabupaten Dompu, maka pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan seperti: pemberdayaan aparatur pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. Kebijakan ekonomi yang lebih menekankan mengembangankan wilayah sesuai dengan potensi alamnya. Kebijakan perhubungan dengan membangun beberapa sarana jalan dan terminal. Dan dalam bidang kesejahteraan sosial dan budaya pemerintah memperhatikan para pejuang veteran dengan memberikan santunan, pembinaan generasi muda, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Kibijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kabupaten Dompu, sekaligus memberikan manfaat sebesar-besamya bagi masyarakat Dompu.

Mahasiswa, banyak yang protes karena tidak sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada, dan issu-issu mengenai money poliik tapi semua itu di bantah oleh DPRD Kabupaten Dompu, karena menurut mereka proses ini sudah benar sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga DPRD Dompu memberanikan diri untuk mengambil sikap dan tindakan dengan mengacu keputusan Mendagri No. 36 Tahun 1995 pada pasal 8 dan pasal 14 ayat 1.

Perubahan itu dilakukan mengeluarkan penetapan presiden (panpres No 6 tahun 1959) tentang pemerintah daerah disempunakan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang urusan rumah tangga daerah (Otonomi) dan tugas perbantuan dalam pemerintahan tetap dilakukan berdasarkan ketentuantuan daerah dalam Undang-undang No 1 tahun 1957. Struktur pemerintahan tersebut berlaku secara seragam di yang baru terbentuk integral termasuk Dompu.

Oleh karena itu antara tahun 2000-2005, pemerintah kabupaten Dompu membangun delapan (8) puskesmas dan sembilan (9) puskesmas keliling, Selain itu pemerintah juga menggalang pos pelayanan terpadu bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kegiatan penerangan dalam bidang kesehatan dan puskesmas yang di maksud ialah Puskesmas Kecamatan Dompu,Puskesmas Dompu Timur, Puskesmas Pajo,Puskesmas Hu,u, Puskesmas Woja, Puskesmas Manggelewa, Puskesmas Kilo, dan Puskesmas Pekat, dan masing-masing menpunyai mobil Puskesmas keliling untuk meringankan pekerjaan Puskesmas tiap-tiap

kecamatan. Dan rumah sakit umum ada satu dan puskesmas pembantu ada 12.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat membangun perkembangan Kabupaten Dompu sebagai tempat penelitian, adapun saran-saran yang akan disampaikan, adalah: (1) Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk lebih meningkatkan penelitiannya tentang Dinamika Kabupaten Dompu Pada Masa Pemerintahan Abubakar Ahmad Tahun 2000-2005 terutama yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya Kabupaten Dompu; (2) Kepada pemerintahan daerah Kabupaten Dompu dapat menyusun dokumen yang penting terkait masalah dinamika Kabupaten Dompu supaya ada peningkatan disetiap tahunnya. Agar perkembangan yang terjadi jelas dokumentasinya. tidak terlalui tanpa ada dokumentasinya; (3) Kepada masyarakat untuk senantiasa memberi dukungan moril serta material dan dalam rangka mensukseskan program pembangunan di kabupaten Dompu terutama dalam pelaksanaan undang-undang Otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah; (4) Kepada H. Abubakar Ahmad semoga tetap diberikan Kesehatan dan selalu menjadi rujukan dan pengingat tentang tulisan yang saya tulis, dalam rangaka untuk mencerminkan bagaimana dinamika Pemerintahan pada masa Abubakar Ahmad pada tahun 2000-2005.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. PT. Logos Wacana Ilmu, Bukit Pemulang Indah.

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal.* Yogyakarta: Pustika Pelajar.

Agus Dwiyanto. 2002. *Reverensi Birokrasi Publik di Indonesia.* PSKK-UGM Yogyakarta.A

mal Ichlasul MacAndrews Colin, 2003. *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*.PT. Raja Grofindo Persada. Jakarta.

BPS, Kaupaten Dompu.2000. *Dompu Dalam Angka.* Dompu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu**.**

BPS, Kabupaten Dompu 2002. *Dompu Dalam Angka* Dompu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu

Daliman,A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak, Perumahan Nogotirto III : Yogyakarta.

Dermawansyah, 2000. *DPRD dan Partai Politik.* Nusa Tenggara Barat: UMM.

Guy Rocher, 1972. *A General Introduction to Sociology,* A Theorithical Prespective*,* Toronto : Macmillan Company of Canada.

Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.* Jakarta: Pt Bima Aksara.

http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-tentang-pemerintah-daerah.html

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Manggaukang, Raba. 2000. *Gema Pembangunan Kabupaten Dompu.* Dompu: Humas Pemda Kabupaten Dompu.

Mustopedidgaga. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik.* Jakarta: Duta Pertiwi.

Zuriah, N.2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan.* Jakarta: Pt Bima Aksars.

Sartono Kartodirjo, 1982 *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif.* Jakarta : Gramedia.

Slamet Santoso, 2004. *Dinamika Kelompok Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara

Sjamsuddin, Helius. 1994. *Metodologi Sejarah.* Jakarta: Depdikbid.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Kencana Preneda Media Group.

Soerjono, Soekanto. 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Raga Grapindo parsada.

Sugiyono.2018. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta Cv.

Suryanto, Agus. 2010. *Sejarah Kabupaten Dompu (11 April 1815).* Pemerintah Kabupaten Dompu. Jabi.

Prakoso Djoko, 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaanya*. Ghalia Indonesia.Jakarta Timur.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik.* Teori Aplikasi dan Penelitian Jakarta: Salemba Humanika.